

KELEMBAGAAN PEMASARAN KAKAO BIJI DI TINGKAT PETANI KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

Institutional of Marketing for Cocoa Beans at Farm Level in Parigi-Moutong Regency, Central Sulawesi Province

Sisfahyuni¹, M.S. Saleh², dan M.R. Yantu³

¹Staf Pengajar dan Peneliti pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Palu

²Guru Besar dan Peneliti pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Palu

³Staf Pengajar dan Peneliti pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Palu

ABSTRACT

Objectives of this study are: (i) to identify and to analyze characteristics of farmers and their cocoa farms; (ii) to identify and to analyze market structure and conduct of cocoa beans at farm level; and (iii) to analyze the factors affecting farmers in selecting the principal-agent institution. This study uses a descriptive analysis and a logit model using primary data. The average trained farmers' age is older than those untrained. Involvement of trained farmers in the principal-agent institution is less than the untrained farmers. Farmers' characteristics are the important factor in determining their opportunity in selecting principal-agent institution. Cocoa yields are relatively low and tend to be constant. Relatively low cocoa yields make the farmers' income low and they have to select a principal-agent institution requiring a high-cost contract. Farm size is elastic and has a negative sign indicating an increase in farm area will reduce an opportunity in selecting a principal-agent institution. Many farmers as cocoa bean producers are risk avert and the cocoa traders are double-rent seekers and, thus, the market structure is oligopsony. The factors significantly affecting farmers in selecting a principal-agent institution are farmers' land area size, credit value from the bank, farmers' experiences, total of farmers' households members, farmers perception on price information and cocoa beans quality, banks' credit procedures, land tax, production factors' values (except urea value), cocoa farm-business income, and other farm incomes. Some programs to revitalize cocoa beans marketing at farm level are: farmers' land legalization; farmers' cooperation improvement within groups and federations; motivating cocoa farmers to develop other farm business, banks' credit procedure socialization, and improving farmers' access to market information.

Key words : institutional of marketing, marketing of cocoa beans, central sulawesi, cocoa farm

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah (i) mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik petani dan usahatani kakao; (ii) mengidentifikasi dan menganalisis struktur dan perilaku pasar kakao biji di tingkat petani; dan (iii) mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam memilih kelembagaan prinsipal-agen. Metode analisis

KELEMBAGAAN PEMASARAN KAKAO BIJI DI TINGKAT PETANI KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH Sisfahyuni, M.S. Saleh, dan M.R. Yantu

yang digunakan adalah analisis deskriptif dan model logit. Data yang digunakan adalah data primer yang diambil dengan teknik *purposive* dan *un-proportional stratified random sampling*. Ada sebanyak 120 petani kakao dan 24 pedagang di berbagai tingkatan telah diwawancarai. Rata-rata petani kakao responden memiliki umur produktif di mana rata-rata petani PSL lebih tua daripada rata-rata petani PBSL, namun keterlibatan kelompok petani PSL dalam kelembagaan prinsipal–agen kurang dibandingkan dengan kelompok petani PBSL. Karakteristik petani merupakan faktor penting yang menentukan peluang petani dalam memilih kelembagaan prinsipal–agen. Produktivitas usahatani kakao tergolong rendah dan cenderung konstan. Rendahnya produktivitas usahatani kakao berdampak pada rendahnya pendapatan usahatani, sehingga dalam rangka mendapatkan dana untuk usahatani, petani terlibat dalam kelembagaan prinsipal–agen yang memiliki biaya kontrak yang tinggi. Luas lahan UTK adalah elastis dan bertanda negatif, sehingga penambahan luas areal tanam mengurangi peluang petani dalam memilih kelembagaan prinsipal–agen. Petani dengan perilaku aji mumpung (pasrah dan menghindari risiko) sebagai pemasok kakao biji tergolong banyak, sementara pedagang pengumpul dengan perilaku *double-rent seeking* sebagai pembeli kakao biji tergolong sedikit dan bermitra dengan pedagang di atasnya secara vertikal, sehingga struktur pasar kakao biji di tingkat petani adalah oligopsoni. Faktor-faktor yang berpengaruh nyata dalam pilihan petani terhadap kelembagaan prinsipal–agen adalah luas lahan usahatani, jumlah kredit bank, lama pengalaman petani dalam berusahatani, jumlah anggota keluarga petani, persepsi petani tentang informasi harga dan kualitas kakao biji yang dikehendaki pasar dunia; persepsi petani tentang prosedur peminjaman kredit bank, nilai pajak lahan usahatani, nilai-nilai faktor produksi (kecuali nilai pupuk urea), pendapatan usahatani kakao, dan pendapatan usahatani lainnya. Beberapa program yang perlu dilakukan dalam revitalisasi kelembagaan pemasaran kakao biji di tingkat petani, yaitu legalisasi aset lahan, peningkatan kerja sama petani dalam kelompok tani dan gapoktan, motivasi petani dalam mengembangkan cabang usahatani lain, sosialisasi prosedur peminjaman kredit bank, dan pemberdayaan petani dalam aspek informasi pasar.

Kata kunci : *kelembagaan pemasaran, pemasaran kakao biji, sulawesi tengah, usahatani kakao*

PENDAHULUAN

Skala usahatani kakao (UTK) rakyat Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam *increasing return to scale*, sehingga penambahan input menyebabkan kenaikan produksi yang lebih besar daripada satuan input tersebut (Yantu *et al.*, 2009a, 2009b), tetapi tidak semua petani mampu membeli input faktor, karena harga-harganya tinggi. Hanya 20 persen petani kakao mampu membiayai usahatannya, sebagian besar (80%) membutuhkan kredit, namun untuk dapat akses ke kelembagaan kredit terkendala oleh agunan sebagai syarat. Hanya sebagian petani (20%) yang telah memanfaatkan fasilitas kredit (KUPEDES dan KUR), sedangkan sebagian besar (60%) menjalin hubungan kerja sama dengan pedagang pengumpul di tingkat desa dan pedagang desa dalam suatu kelembagaan prinsipal–agen (Yantu *et al.*, 2009a, 2009b). Kelembagaan tersebut menjadi sumber dana sebagian besar petani dalam membiayai usahatani.

Suatu kelembagaan prinsipal-agen merupakan suatu hubungan agensi yang didefinisikan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (prinsipal) mengajak orang lain (agen) menyelenggarakan beberapa jasa dengan pendelegasian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen (Rowley dan Elgin, 1988). Untuk perdagangan kakao biji di perdesaan, petani adalah prinsipal dan pedagang adalah agen (Yantu, 2011). Tampak, inisiatif cenderung dari agen (pedagang), namun agen hanya *menjemput bola*, sehingga menurut Wagner (1988) dalam Rowley *et al.* (1988), agen bisa saja bertindak untuk kepentingannya daripada mempromosikan kepentingan prinsipal.

Kelembagaan prinsipal-agen memiliki biaya kontrak yang bisa mencapai 50 persen dari volume transaksi (Yantu *et al.*, 2009a dan 2009b), sehingga merugikan petani dan *melanggengkan* kemiskinan. Tahun 2010, penduduk Sulteng 2,6 juta jiwa, sekitar 475 ribu jiwa tergolong miskin. Dari angka tersebut, 421 ribu jiwa (88,63%) di perdesaan (BPS, 2011). Dengan jumlah anggota rumah tangga (RT) 4 – 5 jiwa/KK, maka jumlah penduduk miskin di perdesaan Sulteng diperkirakan 94 ribu KK.

Total RT petani kakao di Sulteng adalah 168 ribu KK (Disbun Sulteng, 2010). Oleh karena UTK di terhampar di perdesaan, berarti lebih dari separuh (56%) RT petani kakao tergolong miskin. Berdasarkan data keterlibatan RT petani dalam kelembagaan prinsipal agen (60%), berarti semua RT petani kakao yang tergolong miskin (56%) terlibat dalam kelembagaan tersebut. Jadi, selama petani masih terikat kontrak dalam kelembagaan tersebut, petani tidak mampu keluar dari perangkap kemiskinan.

Kondisi di atas kontradiktif dengan kenyataan bahwa kakao biji merupakan komoditas andalan sektor pertanian, secara khusus subsektor perkebunan. Sumbangannya terhadap PDRB subsektor perkebunan Sulteng 2008 mencapai 41 persen (Yantu, 2011). Dalam jangka panjang, pangsa relatif wilayah untuk komoditas tersebut cenderung membaik dan komposisi industrinya bertanda positif, mengisyaratkan jaminan bagi kesinambungan pasokan kakao biji dalam *supply chain* berbagai komoditas kakao (Yantu *et al.*, 2011).

Nilai produksi kakao biji yang besar, seharusnya kembali ke petani, karena 99,81 persen perkebunan kakao di Sulteng adalah perkebunan rakyat. Kenyataannya, petani terperangkap dalam kemiskinan, sehingga muncul beberapa pertanyaan. Pertama, apakah karaktersitik petani dan karakteristik UTK berperan dalam perilaku petani memilih kelembagaan pemasaran kakao biji? Kedua, apakah struktur dan perilaku pasar kakao di tingkat petani menyebabkan posisi tawar petani lemah, sehingga harga didikte oleh pedagang yang mengakibatkan pendapatan RT petani rendah? Ketiga, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan petani memilih kelembagaan prinsipal-agen yang *notabene* menjadikannya miskin? Penelitian ini bertujuan (i) mengidentifikasi karakteristik petani dan karakteristik UTK di Kabupaten Parimo; (ii) mengidentifikasi struktur pasar dan perilaku pasar kakao di tingkat petani; dan

(iii) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam memilih alternatif kelembagaan prinsipal – agen.

METODOLOGI PENELITIAN

Kerangka Pemikiran

Sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), teknologi dan kelembagaan merupakan faktor-faktor penggerak pembangunan pertanian (Johnson, 1985 *dalam* Pakpahan, 1989). Karakteristik petani masuk dalam faktor SDM, sementara karakteristik usahatani meskipun tidak seluruhnya masuk dalam faktor SDA. Kedua kelompok karakteristik tersebut dalam jangka pendek tidak mengalami perubahan dan diduga berpengaruh dalam perilaku petani memilih kelembagaan pemasaran.

Perilaku petani dan pedagang merupakan perilaku pasar kakao biji di tingkat petani. Perilaku pasar berpengaruh pada struktur pasar, dan sebaliknya (Carlton dan Perloff, 2000). Menurut Purcell (1979), struktur pasar dicirikan oleh jumlah penjual, jumlah pembeli, dan diferensiasi produk. Selanjutnya, untuk kasus paar kakao biji, perilaku pasar merujuk pada perilaku penjual (petani kakao) dan pembeli (pedagang pengumpul di tingkat petani dan pedagang desa), serta ada tidaknya kontrak kerja sama yang melembaga di antara keduanya.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi petani memilih alternatif kelembagaan prinsipal-agen perlu diketahui komponen-komponen kelembagaan, yaitu aturan representasi, batas yurisdiksi, *property rights*). Perubahan kelembagaan dicirikan oleh perubahan satu atau lebih dari komponen tersebut (Pakpahan, 1989). Karena seperti SDM, SDA dan agroteknologi juga sulit diubah dalam jangka pendek, sehingga peran kelembagaan menjadi penting untuk mengimbangi keterbatasan petani. Menurut Saussier (2000) *dalam* Menard (2000), keterbatasan tersebut adalah keterbatasan informasi.

Keterbatasan informasi menyebabkan rasionalitas petani terbatas (*bounded rationality*), sehingga petani bertindak seakan-akan tidak rasional. *Bounded rationality* ialah perilaku yang mendekati rasional (*intendedly rational*), tetapi hanya sangat terbatas (Simon, 1961 *dalam* Williamson, 1996). Kondisi ini menyebabkan kontrak kerja sama petani – pedagang pengumpul dalam kelembagaan prinsipal–agen merupakan kontrak yang tidak lengkap. Menurut Williamson (1996), dengan alasan *bounded rationality*, kontrak yang komprehensif merupakan suatu pilihan yang tidak layak. Karena kondisi pengetahuan petani tidak memungkinkan baginya dalam memahami keluasan kontrak tersebut.

Kontrak yang tidak lengkap didefinisikan sebagai kontrak yang memiliki ketentuan-ketentuan perjanjian yang tidak lengkap yang disebabkan oleh dua

hal, yaitu ketentuan yang tidak jelas (*vague*) dan ketentuan yang memiliki pengertian ganda (*ambiguos*). Keduanya muncul disebabkan oleh ketidakpastian (*uncertainty*) pada saat kontrak dibuat (Menard, 2000). Ketidakpastian secara *common sense* disebabkan oleh *bounded rationality* petani. Ketidakelembagaan kontrak muncul karena kontrak tersebut tidak tertulis sama sekali. Kesepakatan-kesepakatan dilakukan petani kakao dan pedagang pengumpul hanya atas dasar kepercayaan dan ini telah berlangsung lama (melembaga).

Aspek dari *bounded rationality* yang paling sering ditekankan ialah aspek kompetensi kognitif yang terbatas dimana irasionalitas perhitungan (*account irrationality*) sering dipertimbangkan. Sebaliknya, *intended rationality* (tetapi terbatas) merupakan konsep yang lebih luas. Konsep tersebut selain berbicara soal agen-agen yang rasional sebagaimana yang diharapkan (*intendedly rational agents*), juga berbicara tentang pemenuhan manifestasi dari penguasaan (Aumann, 1985; Arrow, 1987 dalam Williamson, 1996), yaitu penguasaan pedagang pengumpul atas pangsa pasar kakao biji di tingkat petani.

Ada dua jenis ketidakpastian, yaitu *endogenous* dan *exogenous*. Ketidakpastian *endogenous* adalah ketidakpastian pasar (ketidakpastian harga kakao biji yang dihadapi oleh petani). Adapun ketidakpastian *exogenous* adalah ketidakpastian kejadian serangan hama dan penyakit kakao (Hirshleifer dan Riley, 1993). Kedua-duanya mempengaruhi pendapatan petani kakao, sehingga ketidakpastian menyebabkan petani bertindak oportunistik, yaitu tindakan orang yang berpaham *opportunism*. Menurut Crozier, 1964 dalam Williamson (1996), seorang oportunis cenderung mengambil keuntungan dalam situasi apa saja, dari semua alat yang tersedia. Jadi, *opportunisme* adalah negatif.

Tindakan oportunistik petani kakao didefinisikan sebagai tindakan *aji mumpung*, memanfaatkan kesempatan dalam menjual kakao biji *secepat mungkin*, sehingga memilih kelembagaan pemasaran prinsipal–agen dengan biaya kontrak yang tinggi. Petani bertindak oportunistik karena memiliki *power*, yaitu sebagai kepala keluarga dan pemilik *asset* (usahatani). Meskipun demikian petani tetap mengindahkan aturan main yang disepakati karena sebenarnya tindakan *aji mumpung* petani dilatarbelakangi oleh *kepasrahan* dalam menghadapi lingkungan pemasaran kakao biji. Di samping itu, hubungan petani dan pedagang telah berlangsung lama. Bila tercipta kondisi yang memungkinkan petani keluar dari kerja sama kelembagaan tersebut, maka petani tidak mungkin bertindak *aji mumpung*. Karena dalam kondisi demikian, petani menguasai informasi pasar dan akses finansial, serta tidak harus terbebani oleh biaya kontrak.

Paparan di atas menunjukkan bahwa kontrak merupakan aturan representasi yang mengatur hubungan antara petani dan pedagang pengumpul dalam kelembagaan prinsipal–agen, sehingga aturan tersebut mengatur permasalahan siapa yang berhak berpartisipasi terhadap apa dalam proses

pengambilan keputusan. Selain aturan representasi, batas yurisdiksi dan *property rights* akan dirujuk untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi petani memilih alternatif kelembagaan prinsipal-agen. Batas yurisdiksi menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam suatu masyarakat yang meliputi perasaan sebagai satu masyarakat, eksternalitas, homogenitas, dan skala ekonomi. Adapun *property rights* merupakan sumber kekuatan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya dalam masyarakat (Pakpahan, 1989).

Dibandingkan petani, pedagang pengumpul mengetahui lebih banyak perkembangan harga dan kriteria mutu kakao biji yang diminta pasar dunia. Kondisi ini ditambah dengan kondisi keterbatasan finansial petani memicu pedagang berperilaku *rent seeking activity*. Swedberg (2003) mengemukakan bahwa dengan aktivitas tersebut, seorang agen berusaha menarik sumber daya untuk dirinya sendiri, sehingga sumber daya menjadi hak monopolinya. Jadi, implikasi penting dari *rent-seeking* ke dalam hak monopoli ialah peningkatan biaya sosial dari monopoli tersebut (Rowley dan Tollison, 1988). Adapun biaya-biaya dari sumber daya langka tersebut ditujukan untuk mendapatkan transfer kekayaan (Buchanan *et al.*, 1980 dalam Stevens, 1993), sehingga aktivitas *rent-seeking* ialah aktivitas yang memanfaatkan proses politik untuk memperbolehkan seorang (sekolompok) agen mendapatkan keuntungan (Stevens, 1993). Aktivitas *rent-seeking* menyebabkan pasar kakao biji terdistorsi, sehingga pasar menjadi tidak *fair (invisible foot)*. Hoff (1993) dalam Hoff *et al.* (1993) mengemukakan bahwa *foot* menggambarkan biaya tak tampak yang dimasukkan oleh aktivitas tersebut ke dalam perekonomian.

Model Analisis

Untuk tujuan butir (i) dan (ii) digunakan pendekatan analisis deskriptif. Analisis deskriptif untuk tujuan butir (ii) memanfaatkan pendekatan *Struktur-Conduct-Performance (S-C-P)* model (Bain, 1968). Untuk mencapai tujuan butir (iii) digunakan pendekatan ekonometrik yang memanfaatkan fungsi logit yang didekati dengan metode *maximum likelihood* (Pindyck dan Rubinfeld, 1998). Fungsi tersebut dimanfaatkan, karena kelembagaan prinsipal – agen merupakan suatu keputusan bagi petani dalam memilih kelembagaan tersebut atau tidak (peubah *binery*). Fungsi tersebut dibangun dengan rujukan komponen-komponen kelembagaan, yaitu batas yurisdiksi, *property rights*, aturan representasi yang dikaitkan dengan karakteristik petani dan usahatani, sehingga dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 POK_i = & \alpha + \beta_1 LLU_i + \beta_2 JKB_i + \beta_3 LPB_i + \beta_4 TPF_i + \beta_5 JAK_i + \beta_6 PUK_i \\
 & + \beta_7 PUL_i + \beta_8 IHK_i + \beta_9 PPK_i + \beta_{10} NPL + \beta_{11} UTK_1 + \beta_{12} NPU_2 + \beta_{13} NPS_3 + \\
 & \beta_{14} NPK_4 + \beta_{15} NPE_5 + \beta_{16} NHE_7 + \delta_1 D1_{1i} + \delta_2 D2_{2i} + \delta_3 D3_{3i} + \varepsilon_i, \dots \dots \dots (1)
 \end{aligned}$$

dimana

- POK_i = Peubah opsi kelembagaan yang dipilih oleh petani (1= Peluang petani kakao biji ke- i memilih kelembagaan Prinsipal – Agen, dan 0=Peluang petani kakao biji ke- i memilih kelembagaan yang lain);
- LLU_i = Luas lahan UTK (Ha) petani ke - i ; (batas yurisdiksi)
- JKB_i = Jumlah kredit bank yang dipinjam oleh petani ke - i (Rp); (*property rights*)
- LPB_i = Lama pengalaman ber-UTK petani ke - i (tahun); (*property rights*)
- TPF_i = Tingkat pendidikan formal petani ke - i (tahun); (*property rights*)
- JAK_i = Jumlah anggota keluarga rumah tangga petani ke - i (orang); (*property rights*)
- PUK_i = Pendapatan UTK rumah tangga petani ke - i (Rp/tahun); (*property rights*)
- PUL_i = Pendapatan dari usaha lain petani ke - i (Rp/tahun); (*property rights*)
- IHK_i = Persepsi petani tentang informasi harga dan kualitas kakao (4=Tidak pasti; 2=Kurang pasti; 0=Pasti bagi petani yang tidak memilih kelembagaan prinsipal - agen); (batas yurisdiksi)
- PPK_i = Persepsi petani tentang prosedur peminjaman kredit bank (4=Sangat sulit; 2=Sulit; 0=Mudah bagi petani yang tidak memilih kelembagaan prinsipal – agen); (batas yurisdiksi)
- NPL_i = Nilai pajak lahan usahatani petani ke - i (Rp/tahun); (aturan representasi)
- UTL_i = Nilai upah tenaga kerja luar keluarga yang dibayarkan oleh petani ke - i (Rp/HOK); (aturan representasi)
- NPU_i = Nilai pupuk urea yang digunakan petani ke - i (Rp); (aturan representasi)
- NPS_i = Nilai pupuk SP-36 yang digunakan petani ke - i (Rp); (aturan representasi)
- NPK_i = Nilai pupuk KCl yang digunakan petani ke - i (Rp); (aturan representasi)
- NPE_i = Nilai pestisida yang digunakan petani ke - i (Rp.) (aturan representasi)
- NHE_i = Nilai herbisida yang digunakan petani ke - i (Rp) (aturan representasi)
- $D1$ = Peubah boneka keterlibatan petani dalam program pertanian, $D = 1$, bila petani BPSL, dan $D = 0$, bila petani PSL; (batas yurisksi)
- $D2$ = Peubah boneka status asal petani $D = 1$, bila petani penduduk asli, dan $D = 0$, bila petani pendatang; (batas yurisdiksi)

D_3 = Peubah boneka jarak usahatani dengan ibu kota; $D = 1$, bila jarak usahatani jauh dari ibu kota, dan $D = 0$, bila jarak tersebut dekat; (batas yurisdiksi)

$\alpha, \beta, \delta, \varepsilon$ berturut-turut adalah intersep, koefisien regresi dan galat.

Koefisien yang diharapkan bertanda positif adalah sebagai berikut :

$$\beta_9, \beta_{10}, \beta_{11}, \beta_{12}, \beta_{13}, \beta_{14}, \delta_1, \delta_2, \delta_3.$$

Sebaliknya, koefisien yang diharapkan bertanda negatif adalah sebagai berikut :

$$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7, \beta_8, \beta_{15}, \beta_{16}.$$

Untuk menghindari *multicolinearity* dan *near singular matriks*, tidak semua peubah karakteristik usahatani diintroduksi ke persamaan (1). Peubah-peubah yang mempengaruhi produksi kakao biji diintroduksi, karena pilihan kelembagaan dilakukan petani untuk menjual produksi yang selanjutnya digunakan memproduksi kembali kakao biji. Jadi, makin tinggi nilai faktor produksi termasuk nilai pajak lahan, makin tinggi peluang petani memilih kelembagaan prinsipal-agen. Selanjutnya, peubah-peubah yang menentukan petani dalam memutuskan untuk mengambil kredit bank (termasuk peubah jumlah kredit bank yang dipinjam petani) diintroduksi, berdasarkan analogi kepentingan finansial, di mana petani memilih kelembagaan prinsipal-agen karena keterbatasan dana untuk biaya faktor produksi.

Peubah persepsi petani tentang prosedur peminjaman kredit bank diintroduksi, karena makin sulit prosedur peminjaman, makin tinggi peluang petani memilih kelembagaan prinsipal-agen. Pernyataan ini didasarkan atas hasil penelitian Robinson (2004), di mana perilaku pelayanan agen bank yang ramah dan kecepatan proses mendapat tanggapan 98 persen dan 95 persen dari responden. Selanjutnya, Peubah indeks harga konsumen diintroduksi, karena asumsi bahwa petani *bounded rationality*. Jadi, makin tidak pasti informasi tersebut, makin tinggi peluang petani dalam memilih kelembagaan prinsipal – agen.

Peubah-peubah karakteristik petani seperti lama pengalaman berusahatani kakao, tingkat pendidikan formal petani dan jumlah anggota rumah tangga petani diintroduksi, karena karakteristik petani berpengaruh pada kinerja usahatani (jumlah produksi kakao biji). Makin baik karakteristik petani (makin lama pengalaman, makin tinggi pendidikan, makin banyak jumlah anggota), makin tinggi produksi dan produktivitas, makin tinggi pendapatan usahatani kakao, makin kurang peluang petani dalam memilih kelembagaan prinsipal-agen. Selanjutnya, peubah pendapatan usahatani kakao rumah tangga petani dan peubah pendapatan dari usaha lain diintroduksi atas dasar pemikiran yang sama. Makin tinggi nilai kedua peubah tersebut, makin

mampu petani kakao membeli input, makin kurang peluang petani memilih kelembagaan prinsipal–agen.

Peubah boneka D1 diintroduksi, karena tingkat *bounded rationality* petani. Keikutsertaan petani dalam program tersebut menambah pengetahuan petani, sehingga makin tinggi pengetahuan petani, makin kurang peluang petani dalam memilih kelembagaan prinsipal–agen. Peubah boneka D2 diintroduksi, karena petani asli lebih apatis dibandingkan dengan petani pendatang (lebih agresif), sehingga makin banyak petani penduduk asli, makin tinggi peluang petani memilih kelembagaan prinsipal–agen. Peubah boneka D3 diintroduksi, karena jarak mempengaruhi petani dalam menjual kakao biji ke pasar di ibu kota (kecamatan dan kabupaten). Jadi, makin jauh dari ibu kota, makin tinggi peluang petani memilih kelembagaan prinsipal–agen.

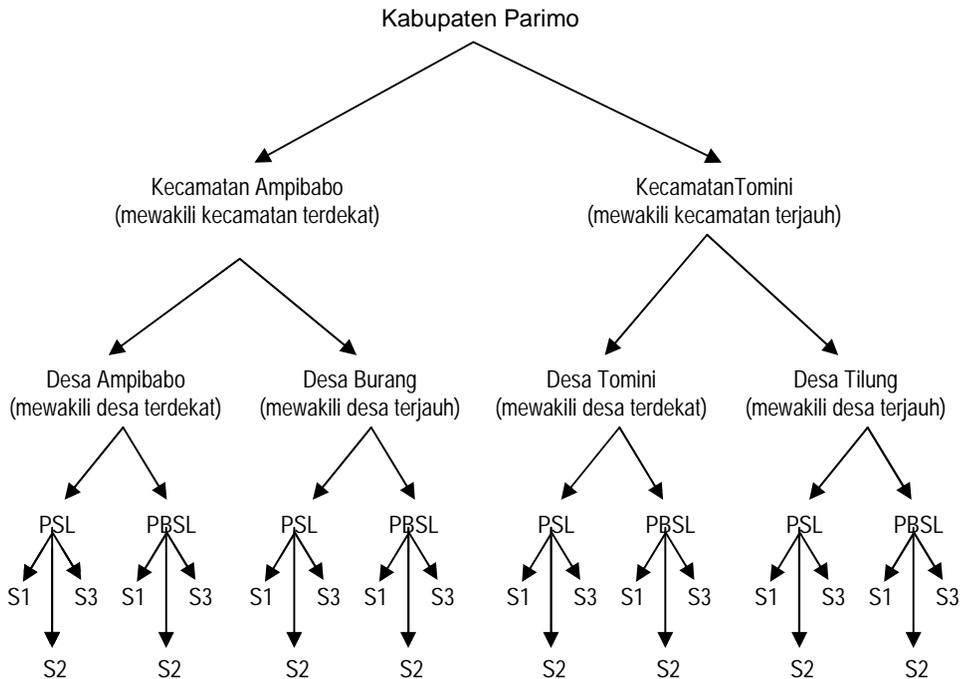
Analisis pilihan kelembagaan sebagai peubah *binary* telah banyak diselenggarakan. Salah satunya, Hobbs (1997) memanfaatkan model Tobit, karena kedua kelompok yang dianalisis adalah berbeda. Sebaliknya, dalam penelitian ini digunakan model logit, karena kedua kelompok (yaitu petani yang memilih kelembagaan prinsipal – agen, dan yang tidak memilih kelembagaan tersebut) adalah kelompok responden yang sama.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diambil dengan teknik *purposive* dan *unproportional stratified random sampling*. Teknik *purposive* diterapkan pada penentuan lokasi. Kabupaten Parimo dijadikan sampel karena merupakan kabupaten pemasok peringkat pertama kakao biji Sulteng. Adapun prosedur pengambilan data diilustrasikan dalam Gambar 1.

Di setiap desa sampel ditemukan dua kelompok tani kakao yang telah mengikuti program PSL (telah terbentuk lama), dan di Kecamatan Ampibabo, selain dua kelompok tani tersebut ditemukan di setiap desa sampel empat kelompok tani kakao yang belum mengikuti PSL. Setiap kelompok memiliki anggota yang bervariasi, 20 - 25 petani. Kedua kelompok tani kakao dari petani PSL di setiap desa dijadikan kerangka sampling. Demikian pula kelompok tani kakao yang belum mengikuti program PSL di setiap desa sampel di Kecamatan Ampibabo. Di Kecamatan Tomini di setiap desa sampel tidak ditemukan kelompok tani kakao dari petani PSL, semua petani kakao yang tidak bergabung dalam kelompok tani dijadikan kerangka sampling. Di setiap desa sampel dari kecamatan tersebut ditemukan 30 KK yang memiliki usahatani dominan kakao dan dijadikan kerangka sampling.

Strata petani dilakukan sebelum sampling, sehingga berdasarkan kerangka sampling dipilih secara acak dan diwawancarai lima orang petani untuk setiap strata. Jadi, total petani responden yang diwawancarai adalah 120 orang. Petani responden, baik peserta prinsipal–agen maupun bukan peserta tersebar secara acak dalam berbagai strata.



Keterangan : PSL = Kelompok petani peserta sekolah lapangan; PBSL = Kelompok petani bukan peserta sekolah lapangan; S1 = Strata 1, petani dengan luas lahan usahatani (LLU) < 1 Ha; S2 = Strata 2, yaitu petani dengan 1 Ha < LLU < 1,5 Ha; dan S3 = Strata 3, yaitu petani dengan LLU > 1,5 Ha; setiap strata diambil secara random 5 petani responden.

Gambar 1. Bagan Alir Pengambilan Sampel

Di samping petani, telah diwawancarai 24 pedagang, yaitu delapan pedagang pengumpul (dua di setiap desa), delapan pedagang desa (dua di setiap desa), empat pedagang kecamatan (dua di setiap kecamatan), dua pedagang besar di Kota Palu, dan dua eksportir di Kota Palu. Pedagang responden dipilih secara *purposive*. Wawancara dilakukan pada Agustus – September 2010.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi Penelitian

Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terletak pada jarak 65 KM ke arah utara dari Palu, ibu kota Sulawesi Tengah (Sulteng). Adapun wilayah Sulteng

terletak pada posisi 2°22' LU dan 3°48' LS, serta 119°22' BT dan 124°22' BT. Luas wilayah Parimo adalah 6.231,85 KM² atau 9,16 persen dari total luas wilayah Sulteng (BPS, 2010). Wilayah Parimo menghadap Teluk Tomini, sehingga terletak sepanjang pantai Timur Sulteng. Pada sisi lain, Kabupaten Donggala terletak sepanjang Pantai Barat Sulteng. Dengan posisi demikian, Sulteng dipengaruhi dua musim, yaitu musim barat (MB) yang kering (Oktober – Maret), dan musim timur (MT) yang membawa uap air (April – September). Pada saat MB, Kawasan Pantai Barat – KPB, yaitu Kabupaten Donggala yang merupakan pemasok peringkat II kakao biji Sulteng mengalami musim panas, tetapi Kawasan Pantai Timur – KPT, yaitu Kabupaten Parimo yang merupakan pemasok peringkat I kakao biji Sulteng mengalami musim hujan. Sebaliknya, pada saat MT, KPT mengalami kekeringan (musim panas), tetapi KPB mengalami musim hujan (BPS, 2010). Perbedaan musim pada dua kabupaten tersebut berdampak pada pasokan kakao biji di Sulteng karena panen raya pokok kakao biji di Sulteng berlangsung hampir sepanjang tahun di mana kedua kawasan (penghasil dominan kakao biji di Sulteng) memiliki dua musim yang bergantian. Pada MB (Oktober – Maret) panen raya terjadi di Kabupaten Donggala dan pada MT (April – September) panen raya terjadi di Kabupaten Parimo (Yantu, 2011, Yantu *et al.*, 2010 dan Yantu *et al.*, 2009a).

Karakteristik Petani Kakao Responden

Sepuluh (50%) dari petani responden adalah pendatang, yaitu transmigran swakarsa yang berasal dari Jawa dan Sulawesi Selatan (Bugis dan Toraja). Karakteristik responden yang tertera dalam Tabel 1 konsisten dengan karakteristik petani kakao yang dilaporkan oleh Yantu *et al.* (2009a). Ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek SDM sebagai salah satu faktor penggerak pembangunan pertanian (UTK) tidak mengalami perubahan.

Tabel 1 menunjukkan bahwa secara umum tidak ada perbedaan yang nyata dari karakteristik kedua kelompok petani responden, kecuali dalam persentase keterlibatan jumlah anggota keluarga petani dalam usahatani kakao. Meskipun demikian, secara deterministik, rata-rata petani kakao responden memiliki umur produktif (45 tahun) di mana rata-rata petani PSL lebih tua dibandingkan dengan petani PBSL. Selain itu, petani PSL memiliki karakteristik yang lebih tinggi daripada petani PBSL dalam hal lama pengalaman berusahatani kakao dan keterlibatan jumlah anggota keluarga dalam usahatani. Jadi, ketiga karakteristik tersebut menyebabkan rendahnya keterlibatan petani PSL (48,33%) dalam kelembagaan prinsipal–agen daripada petani PBSL (93,33%).

Meskipun keterlibatan petani dalam kelembagaan prinsipal – agen menurut status petani dalam program berbeda secara deterministik, namun

secara probabilistik status tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap peluang petani dalam memilih kelembagaan tersebut (lihat Tabel 4). Ini disebabkan oleh tingkat pendidikan formal petani kedua kelompok tersebut yang tergolong rendah (rata-rata sembilan tahun) dan mempersempit *bounded rationality* petani, sehingga petani makin kurang mampu menyerap informasi perkakaoan tentang harga, kualitas kakao, agroteknologi budidaya kakao dan pascapanennya. Selain tingkat pendidikan formal petani, maka lama pengalaman berusahatani juga berperan penting dalam memperluas *bounded rationality* petani. Lama pengalaman berusahatani rata-rata 12 tahun cukup memadai bagi petani kakao dalam menambah kapasitas pengetahuannya tentang informasi perkakaoan, sehingga petani tidak harus terlibat dalam kelembagaan prinsipal–agen. Kelompok petani PSL dengan rata-rata lama pengalaman berusahatani yang hanya lebih lama satu tahun dibandingkan dengan petani PBSL, namun persentase keterlibatan kelompok petani PSL dalam usahatani kakao adalah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok petani PBSL.

Tabel 1. Karakteristik Petani Kakao (Responden) Kabupaten Parimo Tahun 2010

Karakteristik petani	PBSL			PSL			Rataan		
	Asli	Pen-datang	Rataan	Asli	Pen-datang	Rataan	Asli	Pen-datang	Rataan
Rataan Umur (Tahun)	46	42	44	46	47	46	46	44	45
Rataan Pendidikan Formal (Tahun)	8	10	9	9	10	9	8	10	9
Rataan Pengalaman Berusahatani (Tahun)	12	12	12	13	13	13	12	13	12
Rataan Jumlah Anggota Keluarga (Jiwa)	5	4	5	5	5	5	5	4	5
Rataan Persentase Jumlah Anggota Keluarga yang Terlibat dalam Kegiatan UT (%)	43,90	66,36	54,19	52,95	72,72	63,18	47,92	72,95	60,22

Keterangan : PBSL = Petani bukan peserta sekolah lapang; PSL = Petani peserta sekolah lapang

Karakteristik berdasarkan pengelompokan petani asli dan pendatang terlihat bahwa petani pendatang lebih muda dibandingkan petani penduduk asli. Meskipun umur lebih muda, namun rata-rata petani pendatang memiliki pengalaman berusahatani yang lebih lama, tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi dan persentase jumlah anggota keluarga yang terlibat dalam usahatani yang juga lebih tinggi. Karakteristik-karakteristik tersebut yang mendorong petani

pendatang dalam melakukan transmigrasi swakarsa. Selanjutnya, berdasarkan rataan persentase keterlibatan JAK petani terhadap aktivitas usahatani yang tampak tinggi, rumah tangga petani asli (hampir 50%) dan rumah tangga petani pendatang (>70%), mengindikasikan bahwa UTK merupakan usahatani andalan, terutama bagi RT petani pendatang.

Karakteristik Usahatani Kakao (UTK)

Petani kakao mengelola UTK rata-rata 1,13 Ha (lihat Tabel 2). Sebagian besar petani kakao (71,67%) mengusahakan UTK pola tanam monokultur. Persentase kelompok petani PSL dengan pola monokultur lebih kecil daripada persentase kelompok petani PBSL, dan sebaliknya untuk pola tumpangsari. Padahal, pola tanam monokultur memiliki risiko yang tinggi terhadap serangan hama dan penyakit dibandingkan tumpangsari. Ini mengindikasikan kemampuan pengetahuan kelompok petani PSL yang lebih tinggi daripada kelompok petani PBSL dalam hal manajemen usahatani.

Komponen penerimaan UTK dalam Tabel 1 dihitung berdasarkan produktivitas rata-rata (dalam Tabel 2) dan rata-rata harga kakao biji kering di tingkat petani, yaitu Rp 17.149/Kg yang diperoleh dari hasil wawancara dengan petani. Tabel 3 menginformasikan bahwa rata-rata pendapatan UTK per hektar kelompok petani PSL lebih tinggi daripada kelompok PBSL, baik monokultur maupun tumpangsari. Hal yang menarik adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan usahatani. Kelompok petani PSL mengalokasikan biaya rata-rata per hektar lebih rendah daripada kelompok petani PBSL. Meskipun demikian, untuk tumpangsari, kelompok petani PSL mengalokasikan biaya rata-rata per hektar lebih tinggi. Temuan ini konsisten dengan temuan sebelumnya di mana angka persentase kegagalan panen pola tumpangsari yang lebih rendah pada usahatani yang dikelola kelompok petani PSL daripada kelompok PBSL. Selain itu, persentase pendapatan UTK tumpangsari pada usahatani yang dikelola kelompok petani PSL tidak anjlok pada saat muncul serangan hama dan penyakit kakao, sebagaimana yang terjadi pada kelompok petani PBSL. Sebenarnya, hal ini disebabkan oleh kemampuan manajemen usahatani kelompok petani PSL yang lebih tinggi daripada kelompok petani PBSL.

Kembali ke Tabel 2, menggunakan angka-angka produktivitas kakao Sulteng tahun 2009, riil adalah 568 dan maksimum adalah 1.078 kg/ha/tahun (Yantu *et al.* (2009a dan 2009b), disimpulkan bahwa tingkat produktivitas di Parimo cenderung konstan. Jadi, belum ada perbaikan (peningkatan) produktivitas kakao di Parimo. Ini mengisyaratkan bahwa tidak ada perbaikan dalam agroteknologi yang diadopsi petani kakao. Padahal tingkat produktivitas tersebut tergolong rendah. Menurut Spillane (1995), produktivitas potensial kakao di Indonesia adalah 2.000 kg/ha/tahun. Yantu (2011) mengemukakan bahwa Sulteng memiliki dua klon unggulan, Klon Bulili (BP-07) dengan

produktivitas potensial 2.686 kg/ha/tahun dan Klon Sausu (SP-07) dengan produktivitas potensial 2.453 kg/ha/tahun.

Tabel 2. Beberapa Karakteristik UTK Rakyat Di Parimo Menurut Status Petani dan Pola Tanam

Karakteristik petani	PBSL			PSL			Rataan		
	Mono	TS	Rataan	Mono	TS	Rataan	Mono	TS	Rataan
Pola Usahatani (%)	75,00	25,00	50,00	68,33	31,67	50,00	71,67	28,33	50,00
Rataan Luas Lahan Garapan (Ha)	1,14	1,20	1,15	1,10	1,12	1,11	1,12	1,16	1,13
Rataan Umur Tanaman. (Thn)	10,22	13,20	10,97	10,80	14,11	11,85	10,50	13,71	11,41
Rataan Kepadatan Tanaman (Pohon/Ha)	831	450	736	807	447	693	820	448	715
Gagal Panen (%)	39,93	43,57	40,78	41,67	37,00	40,22	40,76	39,79	40,50
Produktivitas (Kg/Ha/Tahun)									
- Riil*	655,33	321,33	571,83	815,32	482,68	707,72	731,60	411,50	640,91
- Maksimum**	1.084,99	568,24	955,81	1.395,46	783,21	1.206,17	1.236,62	694,69	1.083,07

Catatan: PSL = Petani peserta program sekolah lapang; PBSL = Petani bukan peserta program tersebut; Mono = Pola tanam monokultur; TS = Pola tanam tumpangsari;

*) Produktivitas yang dicapai oleh petani pada saat wawancara;

**) Produktivitas maksimum yang pernah dicapai oleh petani tahun-tahun sebelumnya, dan dilaporkan petani pada saat wawancara.

Tabel 3. Pendapatan Rumah Tangga Petani Kakao Menurut Status Petani dan Pola Tanam, Tahun 2010 (Rp. Juta/Ha/Tahun)

Karakteristik petani	PBSL			PSL			Rataan		
	Mono	TS	Rataan	Mono	TS	Rataan	Mono	TS	Rataan
Penerimaan UTK									
- Riil	11,24	5,51	9,81	13,98	8,28	12,14	12,55	7,06	10,99
- Maksimum	18,61	9,74	16,39	23,93	13,43	20,68	21,21	11,91	18,57
Biaya UTK	2,91	2,30	2,76	2,24	3,03	2,47	2,59	2,70	2,62
Pendapatan UTK									
- Riil	8,33	3,21	7,05	11,74	5,25	9,67	9,96	4,36	8,38
- Maksimum	15,70	7,44	13,63	21,69	10,40	18,21	18,62	9,21	15,96

Catatan: Penerimaan riil = Penerimaan yang didasarkan atas produktivitas riil; Penerimaan maksimum = Penerimaan yang didasarkan atas produktivitas maksimum; Produktivitas riil = Produktivitas yang dicapai oleh petani pada saat wawancara; Produktivitas maksimum = Produktivitas maksimum yang pernah dicapai oleh petani tahun-tahun sebelumnya, dan dilaporkan petani pada saat wawancara; Biaya usahatani tidak termasuk biaya upah tenaga kerja dalam keluarga.

Produktivitas riil ialah produktivitas dalam kondisi serangan HP yang berat (tidak terkendali). Selain hama *pod borer* (penggerek buah kakao-PBK), tanaman kakao di Parimo juga terserang penyakit busuk buah kakao (BBK), dan penyakit VSD (*Vascular Streak Dieback*). Diperkirakan tanaman rusak, 41 persen. Adapun, produktivitas maksimum ialah produktivitas yang pernah dicapai pada kondisi serangan HP yang terkendali.

Selain serangan HP, produktivitas UTK dipengaruhi umur tanaman yang rata-rata berumur produktif, yaitu kurang dari 15 tahun (lihat Tabel 2). Rata-rata umur tanaman kakao kelompok petani PSL dan PBSL hanya berbeda setahun, sehingga tidak menjadi alasan bagi perbedaan produktivitas UTK kedua kelompok tersebut. Ini kembali mengisyaratkan bahwa kemampuan manajemen UTK kelompok petani PSL lebih tinggi daripada kelompok PBSL.

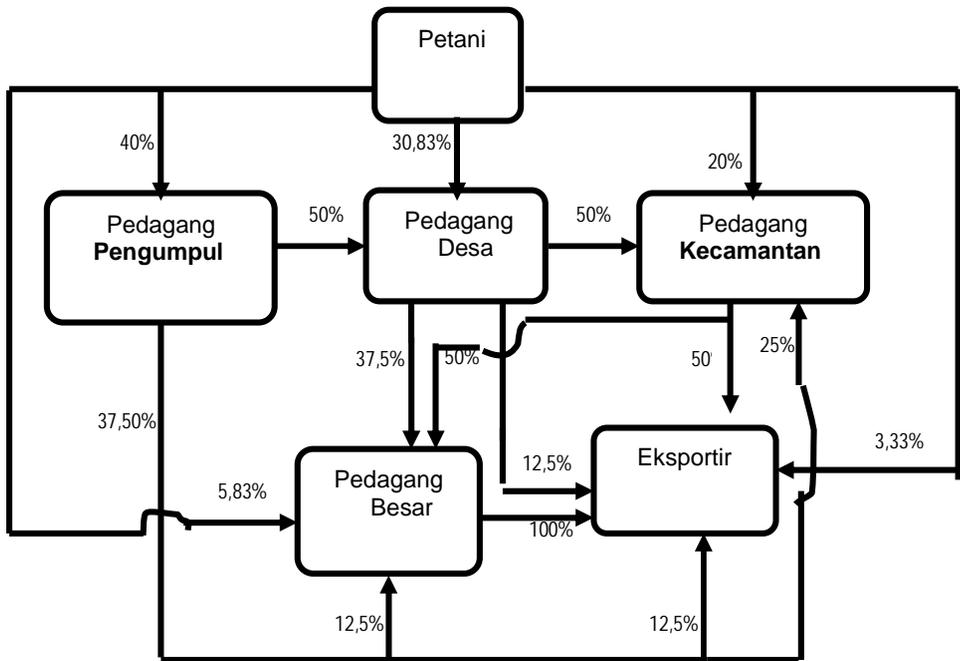
Kepadatan tanaman juga menentukan produktivitas UTK. Rata-rata kepadatan tanaman kakao hanya 715 pohon/ha. Padahal, rata-rata jarak tanam adalah 3X3 m, sehingga semestinya rata-rata kepadatan tanaman adalah 1.100 pohon/ha. Jadi, petani tidak lagi menyulam tanaman yang mati. Selanjutnya, hal yang sangat menarik adalah rata-rata kepadatan tanaman kelompok petani PSL lebih rendah daripada kelompok PBSL. Ini berarti kelompok petani PSL tidak melakukan penyulaman dibandingkan dengan kelompok petani PBSL. Hal tersebut disebabkan oleh ketersediaan bibit kakao yang kurang memadai. Hampir semua petani PSL menanam bibit kakao hibrida. Menurut sumber pada Dinas Perkebunan Sulteng bahwa benih F1 kakao berasal dari Puslit KOKA Jember dan PT. Hasfarm Di Sulawesi Tenggara (Ladongi). Tidak semua petani kakao mendapatkan jatah benih tersebut, kecuali petani peserta proyek. Sebagian benih tersebut juga dipasok oleh DPD ASKINDO Sulteng langsung ke petani (Yantu, 2011).

Struktur Pasar Kakao Di Tingkat Petani

Selain produktivitas riil yang rendah, petani kakao menghadapi masalah struktur pasar kakao biji di tingkat petani. Penjualan kakao biji melibatkan petani yang sangat banyak, sebaliknya, pembeli kakao biji adalah pedagang (pengusaha ekspor di Kota Palu) yang hanya terdiri atas belasan perusahaan. Para eksportir menjalin hubungan kerja sama dengan pedagang besar dan pedagang kecamatan. Selanjutnya pedagang kecamatan menjalin hubungan dengan pedagang desa dan pedagang pengumpul. Jumlah pedagang di setiap jenjang tidak lebih daripada 10 pedagang, kecuali pedagang besar di Kota Palu (mencapai belasan). Bahkan pedagang pengumpul di setiap desa tidak lebih dari 5 pedagang, sehingga pembeli kakao biji di Parimo tergolong sangat sedikit.

Pola umum rantai pemasaran kakao biji di Parimo diilustrasikan pada Gambar 1. Ilustrasi tersebut konsisten dengan yang dilaporkan oleh Yantu (2011), Yantu *et al.* (2010), Yantu *et al.* (2009a) dan Sisfahyuni *et al.* (2008). Ini menunjukkan peranan kelembagaan pemasaran perkakaoan di Parimo dalam

jangka pendek belum membaik, sehingga lebih dari 50 persen (70,83%), petani menjual kakao biji di desanya dengan harga yang rendah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sekitar 40 persen petani menjual kakao biji ke pedagang pengumpul, dan sekitar 30,83 persen ke pedagang desa. Alasannya ialah bahwa petani telah terikat kontrak. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan petani dalam kelembagaan prinsipal-agen tidak menurun, sehingga posisi tawar petani sebagai penjual adalah tetap lemah.



Gambar 1. Rantai Pemasaran Kakao Biji Di Kabupaten Parimo

Dengan posisi tawar yang lemah, petani tidak dapat mempengaruhi harga, sebaliknya pedagang dapat menentukan harga. Lemahnya posisi tawar petani tidak hanya disebabkan oleh informasi yang asimetri tentang harga dan kualitas kakao yang dikehendaki pasar dunia, tetapi juga oleh kekuatan pembeli. Karena pasar kakao di tingkat petani tidak memiliki *spot pasar*, maka untuk mendapatkan informasi, petani membangun komunikasi dengan pedagang pengumpul dan pedagang desa, selama bertahun-tahun, sehingga telah melembaga dalam kelembagaan prinsipal-agen. Dalam era komunikasi di mana *handphone celluler* menjangkau perdesaan dan petani (sebagian kecil) telah memanfaatkannya, sehingga semestinya bisa mengakses informasi di luar kelembagaan tersebut. Hal tersebut sering dilakukan petani, namun informasi

yang diperoleh sama dengan yang berasal dari pedagang dalam kelembagaan tersebut.

Paparan di atas menunjukkan bahwa kerja sama secara vertikal antar-pedagang menjadikan informasi homogen dan asimetri bagi petani. Kerja sama tersebut sebagaimana terungkap dalam wawancara adalah kerja sama *sharing* informasi dan dana antarpedagang secara vertikal. *Sharing* tersebut menguntungkan pedagang (pengumpul) yang berhadapan langsung dengan petani, sehingga memperkuat posisi tawar pedagang pengumpul. Jadi, dalam kasus *sharing* informasi harga kakao biji di Parimo, pedagang (pengumpul) mendapatkan keuntungan yang besar. Ini tidak sejalan dengan yang dilaporkan Hueth dan Marcoul (2006) di mana *sharing informasi* meningkatkan keuntungan petani, dan menurunkan keuntungan perusahaan perantara (dalam penelitian ini adalah pedagang kecamatan). Sebenarnya, petani masih bisa mengakses informasi harga dan kualitas kakao biji yang dikehendaki pasar dunia melalui fasilitas internet. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa sebagian kecil petani memiliki sanak saudara (termasuk anak-anak) yang bersekolah di ibu kota (kabupaten dan provinsi). Hal tersebut tidak dilakukan petani, karena tidak satu pun pedagang, baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat dalam kelembagaan prinsipal–agen bersedia membeli secara proporsional dengan tingkat harga dunia.

Perilaku Pasar Kakao Biji

Pasar kakao biji di tingkat petani dapat digolongkan ke dalam pasar yang tidak *fair (invisible foot)*, meskipun sekilas tampak semua partisipan berperilaku *fair (invisible hand)*. Sesungguhnya, perilaku pedagang pengumpul dan pedagang desa adalah mempraktekan aktivitas apa yang diistilahkan oleh Yantu (2011) dan Yantu *et al.* (2009a) sebagai *double rent – seeking*. Aktivitas ini tidak seperti aktivitas *rent – seeking* biasa (melobi dan membayar penguasa untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan), melainkan aktivitas yang lebih parah lagi, karena keuntungan yang diperoleh melalui *bonus* tidak dibagikan lagi ke pihak lain (termasuk pajak untuk penguasa). Situasi ini menjadi sangat menarik, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Bonus ialah biaya kontrak dalam kelembagaan prinsipal–agen di mana setiap transaksi, petani harus membayar hutangnya secara cicil dan memberikan *bonus* kakao biji ke pedagang. Adapun *bonus* untuk pedagang adalah 5 kg kakao biji per transaksi di mana transaksi minimal 10 kg kakao biji. Jadi, *bonus* tersebut secara kasar bisa mencapai 50 persen dari volume transaksi. Yantu *et al.* (2010) dan Sisfahyuni *et al.* (2008) melaporkan bahwa *bonus* tersebut adalah 40 persen. Ini berarti bahwa *bonus* tersebut cenderung meningkat.

Bonus tersebut merupakan bagian dari aturan main (kontrak) dalam kelembagaan prinsipal–agen. Kontrak dalam kelembagaan tersebut merupakan

kontrak yang *incomplete* yang tidak tertulis (hitam di atas putih) dan sudah berlangsung lama (melembaga). Penelitian ini menemukan bahwa 71 persen petani responden terlibat dalam kelembagaan prinsipal-agen. Yantu *et al.* (2009a), melaporkan keterlibatan tersebut 60 persen. Jadi, keterlibatan petani dalam kelembagaan tersebut cenderung meningkat.

Perilaku petani yang terlibat dalam kelembagaan prinsipal – agen sebenarnya dapat dikategorikan dalam perilaku oportunistik (*aji mumpung*). Perilaku tersebut dilatarbelakangi kondisi *bounded rationality*, sehingga petani *pasrah* dalam menghadapi lingkungan pemasaran kakao biji. Meskipun demikian, kepasrahan tersebut masih dalam lingkup rasionalitas (yang terbatas), meminjam istilah Hayami dan Kikuchi (1981), *rasional ala petani*. Pernyataan ini didasarkan atas hasil wawancara bahwa *aji mumpung* dan *kepasrahan* petani merupakan tindakan menghindari risiko. Semua petani responden (100%) yang bergabung dalam kelembagaan prinsipal-agen mengakui bahwa tindakan *aji mumpung* dilakukan dalam rangka menghindari risiko gagal panen. Jadi, petani kakao berperilaku *risk averter*. Perilaku petani seperti ini masih konsisten dengan apa yang dilaporkan oleh Yantu (2011). Sikap petani yang demikian menunjukkan bahwa perilaku petani kakao belum membaik. Jadi, perilaku petani kakao cenderung stabil. Menurut teori pilihan rasional (Scott, 2008), kestabilan tersebut disebabkan oleh peranan lembaga (aturan main).

Paparan di atas menunjukkan bahwa pasar kakao biji di tingkat petani dapat digolongkan ke dalam pasar oligopsoni. Pasar ini tidak memiliki *spot pasar* dengan penjual (petani) yang tergolong banyak dan berperilaku *aji mumpung* (pasrah dan *risk averter*) serta pembeli (pedagang pengumpul dan pedagang desa) yang tergolong sedikit dengan perilaku *double rent seeking* dalam kemitraan vertical.

Faktor-faktor Penentu Pilihan Kelembagaan Pemasaran

Dalam persamaan (1), 19 faktor diintroduksi sebagai peubah penjelas. Hasil analisis logit tertera dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa *MacFadden R-Squared* bernilai 0,8466 yang tergolong sangat tinggi untuk data *cross-section*. Ini mengindikasikan bahwa persamaan tersebut dapat diandalkan dalam melakukan prediksi. Kemampuan prediksi dari persamaan (1) juga diindikasikan oleh *percentage of correct prediction* bernilai 96,67 persen dengan *total gain* 25,83 persen.

Dari 19 peubah penjelas dalam persamaan (1), 14 peubah nyata secara statistik hingga taraf alfa 10 persen yang mengartikan bahwa peubah-peubah tersebut menentukan pilihan petani dalam memilih kelembagaan prinsipal-agen. Selanjutnya, koefisien *marginal effect* (ME) merupakan koefisien elastisitas. Terdapat tiga peubah yang menunjukkan respon elastis dalam pemilihan kelembagaan prinsipal-agen oleh petani. Adapun peubah – peubah tersebut

adalah luas lahan usahatani, persepsi petani tentang informasi harga dan kualitas kakao dan persepsi petani tentang prosedur peminjaman kredit bank.

Tabel 4. Estimasi Model Logit untuk Menganalisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Petani dalam Memilih Kelembagaan Pemasaran

Peubah	Deskripsi peubah	Koefisien	Std. Error	Z-Stat.	Prob.	ME
C	Intersep	104,113,600	45,392,240	2,293,643	0,021800	22,232443 ^{b)}
LLU	Luas lahan usahatani	-9,291,634	4,821,456	-1,927,143	0,054000	-1,984138 ^{c)}
JKB	Jumlah kredit bank	-0,000003	0,000002	-1,762,011	0,078100	-0,000001 ^{c)}
LPB	lama pengalaman berusahatani	-0,314900	0,184470	-1,707,053	0,087800	-0,067244 ^{c)}
TPF	Tingkat pendidikan formal	-0,265538	0,373676	-0,710610	0,477300	-0,056703 ^{ns)}
JAK	Jumlah anggota keluarga	-2,176,216	1,035,318	-2,101,978	0,035600	-0,464710 ^{b)}
IHK	Informasi harga dan kualitas kakao	-5,420,877	2,552,217	-2,123,988	0,033700	-1,157575 ^{b)}
PPK	Prosedur peminjaman kredit bank	8,417,271	3,802,319	2,213,720	0,026800	1,797426 ^{b)}
NPL	Nilai pajak lahan usahatani	-3,370,887	1,575,373	-2,139,739	0,032400	-0,719820 ^{b)}
UTL	Nilai upah tk luar keluarga	0,024923	0,012332	2,021,053	0,043300	0,005322 ^{b)}
NPU	Nilai pupuk urea	0,005140	0,005117	1,004,543	0,315100	0,001098 ^{ns)}
NPS	Nilai pupuk SP-36	0,053619	0,029594	1,811,836	0,070000	0,011450 ^{c)}
NPK	Nilai pupuk KCl	-0,098266	0,056732	-1,732,113	0,083300	-0,020984 ^{c)}
NPE	Nilai pestisida	0,047197	0,016803	2,808,744	0,005000	0,010078 ^{a)}
NHE	Nilai herbisida	-0,046152	0,021208	-2,176,192	0,029500	-0,009855 ^{b)}
PUK	Pendapatan usahatani kakao	-0,000001	0,000000	-2,102,487	0,035500	-0,000001 ^{b)}
PUL	Pendapatan dari usaha lain	0,000001	0,000000	2,262,351	0,023700	0,000001 ^{b)}
D1	Keterlibatan petani dalam program SL (D=1, petani PBSL, D=, petani PSL)	4,756,239	4,847,166	0,981241	0,326500	1,015648 ^{ns)}
D2	Status asal petani (D=1, petani asli, D=0, pendatang)	1,043,299	2,347,105	0,444505	0,656700	0,222786 ^{ns)}
D3	Jarak usahatani ke ibu kota (D = 1, jauh; D = 0, dekat)	-2,796,842	1,813,275	-1,542,425	0,123000	-0,597238 ^{ns)}

McFadden R-Sq = 0,859610; Percentage of correct prediction = 96,67%; Total gain = 25,83%.

Catatan: ME = Marginal effect; a) nyata pada taraf alfa 1%; b) nyata pada taraf alfa 5%; dan c) nyata pada taraf alfa 10%

Peubah luas lahan nyata pada taraf alfa 10 persen, bertanda negatif, sesuai harapan dan elastis. Ini berarti bahwa makin luas lahan usahatani kakao, makin kecil peluang petani memilih kelembagaan prinsipal–agen. Adapun rata-rata luas lahan usahatani kakao responden hanya 1,13 ha/petani. Padahal, perluasan areal merupakan pekerjaan terberat. Meskipun demikian, isyarat koefisien tersebut menjadi penting terkait dengan *property right* dari lahan. Jadi,

**KELEMBAGAAN PEMASARAN KAKAO BIJI DI TINGKAT PETANI KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH** Sisfahyuni, M.S. Saleh, dan M.R. Yantu

kepemilikan lahan secara legal oleh petani menjadi penting dipertimbangkan dan diprogramkan dalam suatu kebijakan. Sebenarnya, dalam Rencana Kerja Pemerintah Indonesia tahun 2006, rancangan program legalitas lahan telah disebutkan dalam butir C3 Revitalisasi Pertanian, subbutir e3 dengan klausa berikut: *penataan pemanfaatan dan sertifikasi tanah di pedesaan, untuk mendukung akses terhadap lahan dan agunan untuk memperoleh permodalan*. Adapun strategi lain untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan ialah menggabungkan petani dalam kelompok (juga gabungan kelompok tani – gapoktan) atau koperasi. Dengan demikian, petani memiliki *power* yang lebih kuat dalam melobi dan mendapatkan akses informasi pasar yang lebih baik.

Selain luas lahan, persepsi petani tentang informasi harga dan kualitas kakao juga elastis, tetapi bertanda negatif, sesuai harapan dan nyata pada taraf alfa lima persen. Ini mengartikan bahwa makin pasti informasi harga dan kualitas kakao dalam persepsi petani, makin kecil peluang petani dalam memilih kelembagaan prinsipal–agen. Ini mengisyaratkan bahwa diperlukan peningkatan akses petani terhadap informasi, sehingga tidak terjadi asimetri. Jadi, pemberdayaan petani dalam kaitan dengan informasi pasar menjadi sangat penting.

Tidak seperti peubah informasi harga dan kualitas kakao, peubah prosedur pengambilan kredit bank, selain elastis, juga bertanda positif, sesuai harapan serta nyata pada taraf alfa 5 persen. Jadi, makin sulit PPK dalam persepsi petani, makin tinggi peluang petani dalam memilih kelembagaan prinsipal–agen, sehingga program sosialisasi PPK tersebut merupakan program yang penting dipertimbangkan di tingkat desa. Temuan tersebut didukung oleh respon pilihan kelembagaan oleh petani dalam jumlah kredit bank. Meskipun, peubah tersebut inelastis, namun bertanda negatif, sesuai harapan dan nyata pada taraf alfa 10 persen. Artinya, makin tinggi persentase jumlah kredit bank yang dipinjam oleh petani, makin kecil peluang petani memilih kelembagaan prinsipal – agen. Sebagaimana yang berlaku umum bahwa kredit membutuhkan agunan, sehingga legalitas aset lahan petani menjadi benar-benar penting.

Selain peubah jumlah kredit bank, peubah lain yang bertanda sesuai harapan dan nyata secara statistik, meskipun tidak elastis adalah peubah lama pengalaman berusahatani. ME dari peubah tersebut bertanda negatif, sesuai harapan dan nyata pada taraf alfa 10 persen. Ini mengartikan bahwa makin lama pengalaman berusahatani dari petani responden, makin kurang peluang petani tersebut memilih kelembagaan prinsipal–agen. Lama pengalaman berusahatani menunjukkan akumulasi pengetahuan petani tentang agroteknologi budidaya dan pascapanen serta informasi pasar. Jadi, pengalaman berbanding lurus dengan kondisi *bounded rationality*nya petani, sehingga penambahan akumulasi pengetahuan petani tentang agroteknologi budidaya, pascapanen dan akses ke kelembagaan finansial, serta informasi pasar menjadi faktor yang penting. Ini dapat dilakukan dengan pengembangan program pelatihan petani untuk faktor-faktor tersebut. Adapun peubah lain yang

diharapkan dapat memperluas kondisi *bounded rationality* petani adalah peubah tingkat pendidikan formal yang meskipun bertanda negatif, sesuai harapan, namun tidak nyata secara statistik.

Peubah jumlah anggota keluarga yang terlibat dalam usahatani bertanda negatif, sesuai harapan dan nyata pada taraf alfa 5 persen. Ini mengartikan bahwa makin banyak JAK petani, makin kurang peluang petani memilih kelembagaan prinsipal–agen. Jadi, dana pinjaman yang diperoleh dari kelembagaan tersebut lebih dominan digunakan dalam penyelenggaraan usahatani, sehingga makin banyak JAK, makin banyak tenaga kerja dalam keluarga. Ini konsisten dengan keterlibatan JAK petani yang lebih besar daripada 50 persen sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Ini juga konsisten dengan efisiensi pemanfaatan tenaga kerja dalam keluarga dalam produksi kakao biji, sebagaimana dilaporkan oleh Yantu (2011) dan Yantu *et al.* (2009a, 2009b).

Paparan di atas menunjukkan bahwa peubah-peubah yang menjadi karakteristik petani sebagian besar (67%) berpengaruh nyata dalam peluang pemilihan kelembagaan prinsipal–agen. Faktor internal keadaan RT petani merupakan faktor penting yang menentukan peluang petani dalam memilih kelembagaan prinsipal–agen.

Peubah-peubah nilai faktor produksi lebih dari separuhnya bertanda positif, sesuai harapan dan nyata secara statistik. Peubah nilai pestisida bahkan nyata pada taraf alfa 1 persen yang mengartikan makin tinggi nilai-nilai faktor-faktor produksi tersebut (upah tenaga kerja luar keluarga – UTK, nilai pupuk SP36 – NPS, nilai pestisida – NPE), makin tinggi peluang petani dalam memilih kelembagaan prinsipal–agen. Ini konsisten dengan temuan sebelumnya bahwa dana pinjaman dari kelembagaan tersebut secara dominan digunakan petani dalam penyelenggaraan usahatani kakao.

Peubah NPL bertanda negatif, tidak sesuai harapan, namun nyata pada taraf alfa 5 persen. Jadi, nilai pajak lahan masih tergolong rendah. Rata-rata nilai pajak lahan adalah Rp 15.673/ha/tahun. Selain NPL, peubah nilai faktor-faktor produksi yang nyata secara statistik, namun bertanda tidak sesuai harapan adalah peubah nilai pupuk KCL (NPK) nyata pada taraf alfa 10 persen dan peubah NHE nyata pada taraf alfa 5 persen. Ini merupakan konsekuensi minimnya pemanfaatan kedua faktor tersebut dalam penyelenggaraan usahatani. Rata-rata NPK dan NHE per hektar per tahun yang digunakan petani adalah Rp 79.242 dan Rp 35.030.

Konsekuensi logis dari tingginya harga-harga faktor produksi adalah tidak saja nilai-nilai pemanfaatan faktor produksi tersebut rendah, tetapi juga pendapatan usahatani kakao (riil) tergolong rendah, sehingga makin tinggi peluang petani memilih kelembagaan prinsipal agen. Peubah pendapatan usahatani kakao bertanda negatif, sesuai harapan dan nyata pada taraf alfa 5 persen. Jadi, makin rendah pendapatan usahatani kakao, makin tinggi peluang

petani memilih kelembagaan prinsipal–agen, dan sebaliknya. Ini mengisyaratkan bahwa peningkatan PUK melalui penurunan tingkat kegagalan panen menjadi hal penting dipertimbangkan, sehingga subsidi faktor-faktor produksi seperti yang diprogramkan dalam GERNAS saat ini menjadi penting dipertahankan hingga petani mandiri dalam finansialnya. Sebenarnya, bila petani bisa keluar dari kerja sama kelembagaan prinsipal–agen, maka pendapatan usahatani yang secara kasar 50 persen dibayarkan untuk *bonus* bisa dinikmati petani dan menjadi sumber dalam pengadaan faktor-faktor produksi.

Tidak seperti pendapatan usahatani kakao, pendapatan usaha lain bertanda positif, tidak sesuai harapan, meskipun nyata pada taraf alfa lima persen. Ini merupakan konsekuensi dari minimnya rata-rata pendapatan usaha lain tersebut. Rata-rata pendapatan usaha lain (kotor) dari petani responden adalah jauh di bawah rata-rata PUK (kotor), yaitu Rp 6,4 juta vs Rp 10,9 juta per tahun.

Tidak satu pun peubah boneka yang berpengaruh nyata terhadap peluang petani dalam memilih kelembagaan pemasaran prinsipal – agen. Temuan ini mengartikan bahwa keterlibatan petani dalam program sekolah lapang, status petani sebagai petani asli maupun pendatang, dan jarak usahatani ke ibu kota tidak berpengaruh terhadap peluang petani dalam memilih kelembagaan prinsipal – agen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Karakteristik umur, pengalaman berusahatani, jumlah anggota keluarga yang terlibat dalam berusahatani petani peserta sekolah lapang yang lebih tinggi dibandingkan petani bukan peserta sekolah lapang menyebabkan rendahnya keterlibatan petani peserta sekolah lapang dalam kelembagaan prinsipal – agen dibandingkan petani bukan peserta sekolah lapang. Petani peserta sekolah lapang yang terlibat dalam kelembagaan tersebut tidak mencapai separuh dibandingkan dengan petani bukan peserta sekolah lapang yang hampir semuanya terlibat. Meskipun keterlibatan petani dalam kelembagaan prinsipal–agen menurut status petani dalam program berbeda secara deterministik, namun secara probabilistik status petani tidak berpengaruh nyata terhadap peluang petani dalam memilih kelembagaan tersebut.

Karakteristik usahatani kakao di Parimo ialah tingkat produktivitasnya yang rendah, yaitu 641 kg/ha/tahun. Pada umur tanaman kakao yang produktif, yaitu 11 tahun. Produktivitas yang rendah tersebut berkorelasi positif dengan kepadatan tanaman yang rendah (715 pohon/ha) dan tingkat serangan HP kakao yang tergolong berat, sehingga menyebabkan kegagalan panen mencapai 41 persen. Rendahnya produktivitas UTK berdampak pada rendahnya produksi kakao biji dan pendapatan petani kakao. Untuk memenuhi kebutuhan dana, sebagian besar (71%) petani terlibat dalam kelembagaan pemasaran

prinsipal–agen yang memiliki konsekuensi logis biaya kontrak dalam bentuk bonus, sehingga merugikan petani. Meskipun demikian, keterlibatan petani dalam kelembagaan tersebut cenderung meningkat.

Paparan di atas menunjukkan bahwa selain faktor internal RT petani (umur, pengalaman berusaha dan jumlah anggota keluarga petani yang terlibat dalam usahatani kakao), faktor eksternal dalam hal ini karakteristik UTK (termasuk asset usahatani) juga berpengaruh terhadap pilihan kelembagaan principal-agen oleh petani.

Posisi tawar petani kakao lemah dan cenderung konstan, karena struktur pasar kakao biji di tingkat petani ialah oligopsoni di mana tidak ada spot pasar, sehingga petani terlibat dalam kelembagaan prinsipal–agen dengan berperilaku *aji mumpung* (pasrah dan menghindari risiko - *risk averter*) dalam menghadapi pedagang pengumpul di tingkat desa dan pedagang desa yang berperilaku *double rent seeking*. Oleh karena itu, alternatif akses kredit menjadi penting agar petani bisa keluar dari kerja sama kelembagaan tersebut. Alternatif tersebut menjadi mungkin dengan dukungan PPK yang jelas dan tidak berbelit-belit. Peubah tersebut elastis dan bertanda positif, sesuai harapan, sehingga program sosialisasi prosedur tersebut menjadi penting diselenggarakan.

Karakteristik usahatani, yaitu luas lahan UTK adalah elastis dan bertanda negatif, sehingga penambahan luas areal tanam mengurangi peluang petani dalam memilih kelembagaan prinsipal–agen. Padahal, perluasan lahan merupakan pekerjaan paling berat dalam UTK. Jadi, legalitas aset lahan menjadi alternatif yang penting, sehingga program legalisasi aset lahan petani kakao menjadi perlu secepatnya diselenggarakan. Program tersebut memungkinkan, sebagaimana diindikasikan oleh peubah NPL yang bertanda negatif, tidak sesuai harapan yang mengindikasikan bahwa nilai pajak masih tergolong rendah. Dengan legalitas tersebut, petani dapat mengakses kredit bank. Peubah JKB, meskipun tidak elastis, namun bertanda negatif, sesuai harapan, sehingga makin tinggi kredit yang dapat diakses oleh petani, makin kurang peluang petani dalam memilih kelembagaan prinsipal–agen. Strategi lain yang dapat ditempuh adalah mendorong petani bergabung dalam kelompok, sehingga pemanfaatan lahan lebih efisien dan petani lebih memiliki *power* baik dalam akses dana maupun informasi pasar.

Selain program legalisasi aset lahan dan program sosialisasi PPK, maka program pemberdayaan petani dalam aspek informasi pasar menjadi sangat penting diselenggarakan. Ini menunjukkan bahwa petani *terkoptasi* oleh informasi pasar dari pedagang di berbagai tingkatan yang sebenarnya telah terkoneksi dalam kerja sama vertikal.

Selain faktor-faktor yang dikemukakan di atas, faktor-faktor lain yang berpengaruh pada peluang petani dalam memilih kelembagaan prinsipal–agen adalah nilai-nilai faktor produksi (kecuali nilai pupuk urea), sehingga program subsidi input faktor seperti dalam program GERNAS perlu dipertahankan hingga

petani mandiri secara finansial. Adapun PUK, meskipun berpengaruh nyata, namun bertanda negatif yang mengisyaratkan keterlibatan petani dalam kelembagaan prinsipal–agen cenderung meningkat. Jadi, strategi untuk mengurangi dan menghilangkan keterlibatan petani dalam kelembagaan tersebut adalah menjadi penting. Salah satu hal adalah motivasi bagi petani dalam mengembangkan cabang usahatani lain (termasuk tumpangsari), sebagaimana diindikasikan oleh pengaruh pendapatan cabang usahatani lain yang positif.

Alternatif program yang dikemukakan di atas, yaitu legalisasi aset lahan, peningkatan kerja sama petani dalam kelompok tani dan gapoktan, motivasi petani dalam mengembangkan cabang usahatani lain (termasuk tumpangsari dengan kakao), sosialisasi prosedur peminjaman kredit bank, dan pemberdayaan petani dalam aspek informasi pasar merupakan program-program yang diperlukan dalam revitalisasi kelembagaan pemasaran kakao di tingkat petani. Dalam revitalisasi tersebut sangat diperlukan peranan pemerintah sebagai fasilitator.

DAFTAR PUSTAKA

- Bain, J.S. 1968. *Industrial Organization*. Second Edition. John Willey & Sons, Inc. New York.
- BPS. 2011. *Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2010*. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta. www.BPS.
- BPS. 2010. *Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2009*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Palu.
- Carlton, D.W. and J.M. Perloff. 2000. *Modern Industrial Organization*. Third Edition. Addison Wesley Longman, Inc. New York.
- Disbun Sulteng 2010. *Laporan Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Sulteng Per Kabupaten Tahun 2009*. Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah. Palu
- Hayami, Y. dan M. Kikuchi. 1981. *Asian Village Economy at the Crossroads: An Economic Approach to Institutional Change*. University of Tokyo Press. Tokyo.
- Hishleifer, J. and J. G. Riley. 1993, *The Analytics of Uncertainty and Information*, Cambridge University Press. Cambridge.
- Hobbs, J.E. 1997. *Measuring the Importance of Transaction Costs in Cattle Marketing*. *American Journal of Agricultural Economics*, Vol. 79 (4): 1083 – 1095, November 1997.
- Hoff, K., A. Braverman and J. E. Stigitz. eds. 1993. *The Economics of Rural Organization, Theory, Practice, and Policy*. Published for the World Bank. Oxford University Press.
- Menard, Claude. (Editor). 2000. *Institutions. Contracts. and Organizations: Perspectives from New Institutional Economics*. Edward Elgar. UK. USA.

- Pakpahan, A., 1989. Kerangka Analitik Penelitian Rekayasa Sosial : Perspektif Ekonomi Institusi. Dalam Prosiding Patanas. Evolusi Kelembagaan Pedesaan Di Tengah Perkembangan Teknologi Pertanian. Penyunting Effendi Pasandaran *et al.*. Pusat Penelitian Agroekonomi. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bina Laksana. Bogor.
- Pindyck, R. S. and D. L. Rubinfeld. 1998. *Econometric Models and Economic Forecasts*. Fourth Edition. Irwin McGraw-Hill. Singapore.
- Purcell, W.D. 1979. *Agricultural Marketing. System. Coordination. Cash and Future Prices*. Restone Publishing Company, Inc. A Prentice Hall Company. Virginia
- Robinson, M.S. 2004. *The Micro Finance Revolution: Pelajaran dari Indonesia*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta
- Rowley. Ch.K.. R. D. Tollison and G. Tullock, eds. 1988. *The Political Economy of Rent Seeking*. Kluwer Academic Publisher. Boston/Dordrecht/ Landcaster.
- Scott, W.R. 2008. *Institutions and Organizations. Foundations for Organizational Science*. A Sage Publications Series, SAGE Publications, International Educational and Professional Publisher. Thousands Oaks, London, New Delhi.
- Sisfahyuni, Ludin, Taufik dan M.R.Yantu. 2008. Efisiensi Tataniaga Komoditi Kakao Biji Asal Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Agroland* 9 (3): 150 – 159, Desember 2008, Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Palu.
- Spillane, J.J. 1995. *Komoditi Kakao. Peranannya dalam Perekonomian Indonesia*. Cetakan Pertama. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Stevens, J. B. 1993. *The Economics of Collective Choice*. Westview Press. Boulder, San Fransisco, Oxford.
- Swedberg R. 2003. *Principles of Economic Sociology*, Princeton University Press. Princeton and Oxford.
- Williamson, O,E. 1996. *The Mechanisms of Governance*. Oxford University Press. New York, Oxford.
- Yantu, M. R. 2011. *Model Ekonomi Wilayah Komoditi Kakao Biji Provinsi Sulawesi Tengah*. Disertasi Doktor pada Program Studi Ilmu-ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Yantu, M.R., Sisfahyuni dan Nilam Sari. 2011. *Industry Mix Kakao Biji Dalam Perekonomian Sulawesi Tengah: Suatu Entry Point Dalam Supply Chain Komoditi Kakao*. *Dalam* Prosiding Nasional Teknik dan Manajemen Industri 2011. Supply Chain Practices and Performance Indicators. Theatre UMM Dome, 10 Januari 2011. Diselenggarakan oleh Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik kerja sama dengan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. ISBN : 978-979 -796-189-3.
- Yantu, M. R., B. Juanda, H. Siregar, I. Gonarsyah dan S. Hadi. 2010, Integrasi Pasar Kakao Biji Perdesaan Sulawesi Tengah dengan Pasar Dunia, *Jurnal Agro Ekonomi* Vol. 28. No.2, Oktober 2010. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. Bogor.

- Yantu, M.R., M.S. Saleh dan Sisfahyuni. 2009a. Pengembangan Model Perdagangan Komoditi Kakao Biji Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Perdesaan Provinsi Sulawesi Tengah. Laporan Akhir Tahap I Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch II Tahun Anggaran 2009. Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Nomor : 323/SP2H/PP/ DP2M/VI/2009, tanggal 16 Juni 2009. Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Nopember 2009.
- Yantu, M.R., M.S. Saleh dan Sisfahyuni 2009b. The Performance of Cocoa Farm's Smallholders in Central Sulawesi. Prosiding Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis Ke-45 Fakultas Pertanian UNEJ. 17 Desember 2009. Fakultas Pertanian Universitas Jember. Jember. ISBN : 979 – 8176 – 73 – 1.